

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan metode kualitatif serta melakukan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dengan empat dimensi yang mendukung optimalisasi dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan fakta di lapangan, masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan yaitu banyaknya bangunan yang berada di kawasan cagar budaya yang bentuk bangunannya tidak bergaya *art deco* seperti ketentuan yang berlaku. Ada pula beberapa bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang bentuknya sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi dan terbengkalai. Komunikasi yang terjalin antara pihak pelaksana sudah berjalan dengan baik.

Sosialisasi telah dilakukan kepada pihak pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya, namun komunikasi belum dilakukan secara masif kepada masyarakat. Sumberdaya yang ada untuk melaksanakan kebijakan ini dinilai belum optimal. Jumlah staf yang tersedia masih kurang sehingga ada beberapa tugas yang masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Faktor lainnya adalah fasilitas yang ada masih belum memadai. Disposisi telah berjalan optimal dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

Insentif telah didapatkan bagi tiap pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi dalam menjalankan peraturan daerah ini dirasa masih kurang optimal. Walaupun belum ada tugas pokok dan fungsi yang mengatur untuk setiap orangnya melaksanakan suatu kegiatan setiap harinya, tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk implementasi kebijakan ini. Belum berjalannya koordinasi secara rutin antara pihak pelaksana kebijakan ini. Koordinasi sangat diperlukan mengingat ada banyak bangunan cagar budaya di Kota Bandung dan pembangunan di kawasan cagar budaya yang bentuk bangunannya tidak sesuai seperti seharusnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pendekatan teori Edward III belum dilengkapi dengan faktor kepentingan pribadi atau kelompok. Subjek kebijakan sering mendapatkan keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan. Kepentingan pribadi atau kelompok ini bisa saja dimiliki oleh pelaksana kebijakan baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung atau Tim Ahli Cagar Budaya.

Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang tidak dapat terlepas dari pengimplementasian kebijakan ini. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah komunikasi yang terjalin antar pelaksana sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Tim Ahli Cagar Budaya memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan whatsapp grup

sehingga dapat mempercepat komunikasi yang terjadi. Kedua adalah pelaksana kebijakan ini sudah kompeten di bidangnya. Personil yang diangkat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah berpengalaman dalam bidang kawasan dan bangunan cagar budaya sedangkan Tim Ahli Cagar Budaya beranggotakan akademisi maupun praktisi dalam bidang arsitektur, pengembang, dan yang fokus dalam hal budaya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pertama kurangnya sosialisasi. Sosialisasi terhadap masyarakat diharap dilakukan secara masif agar masyarakat dapat turut serta dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya. Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan adalah dengan memasang pelakat pada setiap bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah ini. Kurangnya jumlah staf menjadi faktor penghambat yang kedua. Cakupan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya di Kota Bandung sangatlah luas. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menghadapi faktor penghambat ini adalah dengan menambah jumlah staf tenaga honorer sebanyak tiga orang.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Akademis**

Penelitian selanjutnya dengan variable yang sama hendaknya menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan selain yang dikemukakan oleh Edward III. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III berperspektif *top-down*. Hal ini disarankan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Selain itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi

kebijakan ini, sehingga perspektif *bottom-up* diperlukan untuk meneliti implementasi kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

### **5.2.2. Praktis**

Sebagai instansi yang mendapat kewenangan untuk menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menjalankan peraturan daerah tersebut sesuai dengan regulasi serta tugas pokok dan fungsi yang berlaku. Berikut saran dari peneliti kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung:

1. Hendaknya melakukan sosialisasi dan edukasi masif bagi masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di kawasan cagar budaya. Peran masyarakat akan diperlukan untuk turut serta dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini.
2. Peningkatan fasilitas sebaiknya dilakukan. Dengan menganggarkan ruangan khusus dan fasilitas pendukung lainnya untuk Tim Ahli Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai penunjang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya agar kebijakan ini berjalan lebih optimal.
3. Koordinasi hendaknya dilakukan antara instansi terkait untuk mengurangi penyimpangan dalam implementasi kebijakan ini. Atau dengan membuat satu tim gabungan antara antar instansi agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan optimal.

4. Hendaknya Pemerintah Kota Bandung mengperkirakan kemungkinan konflik kepentingan yang dimiliki oleh pelaksana peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini.